

LAPORAN HAK SIPIL DAN POLITIK TERDIRI DARI :

A. HAK ATAS BANTUAN HUKUM

1. Produk hukum daerah yang mengatur mengenai ketersediaan bantuan hukum

Ada Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 5).
Tanggal pengesahan : 11 April 2018
- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
Tanggal pengesahan: 25 Oktober 2018

2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentang bantuan hukum

Ada Tidak Ada

3. Tersedianya bantuan hukum litigasi (peradilan)

Ada Tidak Ada

4. Tersedianya bantuan hukum non litigasi

Ada Tidak Ada

5. Tersedianya Organisasi Bantuan Hukum yang terdaftar

Ada Tidak Ada

6. Persentase masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum

- Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum

2 orang

- Jumlah masyarakat miskin yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum

2 orang

Demikian data capaian pada hak atas bantuan hukum ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Karanganyar, **28** Januari 2022

An. Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

Kepala Bagian Hukum

Zulfikar Hadidh, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750311 199903 1 009

